

kesadaran masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, sistem insentif yang diterapkan untuk pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah di Desa Karangcegak menunjukkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi. Sistem insentif ini bervariasi dan mencakup berbagai bentuk, seperti bonus finansial yang diberikan kepada pekerja TPST berdasarkan pencapaian target pengolahan sampah. Ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Meskipun sistem insentif ini disambut positif dan dianggap efektif dalam meningkatkan partisipasi, ada pandangan bahwa kesadaran lingkungan seharusnya menjadi motivasi utama. Keberadaan sistem insentif ini menunjukkan upaya komprehensif dari pihak pengelola dan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pengelolaan sampah. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada reward jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen jangka panjang terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah diimplementasikan dengan hasil yang cukup efektif di berbagai aspek, meskipun masih ada area yang memerlukan optimalisasi.

Pada aspek birokrasi, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak telah menunjukkan struktur organisasi yang efektif dengan adanya SOP yang jelas dan terstruktur. Pembagian tugas dan koordinasi antara KSM Mekarsari, Pemerintah Desa, dan DLH berjalan dengan baik melalui mekanisme formal maupun informal. Sistem pengelolaan yang fleksibel memungkinkan TPST untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan operasional. Namun, masih diperlukan peningkatan sosialisasi SOP kepada masyarakat umum, pengembangan sistem dokumentasi yang lebih terstruktur, dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk optimalisasi layanan.

Dari aspek komunikasi, distribusi kebijakan telah dilakukan secara terstruktur dari tingkat kabupaten hingga desa dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pelanggan dan non-pelanggan KSM, serta hambatan dalam pemerataan informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan strategi komunikasi yang lebih inklusif, pemanfaatan teknologi digital untuk penyebaran informasi, dan pembentukan forum komunikasi aktif antara pengelola dan masyarakat.

Ditinjau dari aspek sumber daya, TPST Karangcegak memiliki jumlah staf yang ideal untuk operasional normal dengan kompetensi dasar yang memadai. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pengembangan fasilitas dan peningkatan kompetensi staf. Fasilitas dasar yang tersedia cukup memadai tetapi membutuhkan pembaruan dan penambahan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dikembangkan kerjasama dengan pihak swasta untuk pendanaan, peningkatan program pelatihan berkala, dan penyusunan rencana pengembangan fasilitas secara bertahap.

Dalam aspek disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan pemahaman yang baik serta komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah umumnya positif, dan sistem insentif yang diterapkan berjalan efektif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan disposisi yang baik ini, diperlukan pengembangan sistem penghargaan, program pengembangan karir bagi staf, serta peningkatan keterlibatan masyarakat melalui program partisipatif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak telah berjalan dengan efektif dan berhasil menjadi model pengelolaan sampah yang potensial untuk diterapkan di daerah lain. Keberhasilan ini tercermin dari kinerja positif pada keempat aspek yang diteliti, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan melaksanakan berbagai saran perbaikan yang diusulkan, khususnya dalam aspek komunikasi dan sumber daya, TPST Karangcegak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan

lingkungan secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dapat dicapai melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Kebijakan Analisis Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Agranoff, R. (2012). *Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector*. Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(2), 732–749.
- Bogdanor, V. (2005). *Joined-Up Government*. London: Oxford University Press.
- Box, R. C. (2014). Public Administration and Society. In *Public Administration and Society*. <https://doi.org/10.4324/9781315701462>
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder Identificatixon and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>